

Judul : Penyertaan Modal : DPR Belum Setujui Penambahan PMN PT KAI-Djakarta Llyod
Tanggal : Jumat, 14 Juli 2017
Surat Kabar : Pelita
Halaman : 3

PENYERTAAN MODAL

DPR Belum Setujui Penambahan PMN PT KAI-Djakarta Llyod

Jakarta, Pelita

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp2,38 triliun untuk PT Kereta Api Indonesia dan Rp379,3 miliar untuk PT Djakarta Llyod pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2017.

Menurut Sri Mulyani saat rapat kerja RKA-KL Kementerian BUMN 2017 dan 2018 dengan Komisi VI DPR, Kamis (13/7) suntikan modal untuk KAI secara tunai rencananya akan digunakan untuk membangun Light Rapid Transit

(LRT) Jabodebek.

Suntikan modal tersebut sudah melalui koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan dan menteri-menteri terkait.

"PMN ini diberikan supaya KAI bisa membangun LRT Jabodebek sesuai dengan target 2018-2019. Karena keterbatasan belanja negara, maka akan dilakukan kombinasi antara PMN KAI, ditambah dengan Public Service Obligation (PSO) dalam pelaksanaan pengelolaan LRT Jabodebek," tuturnya.

Sedangkan, PMN non tunai

untuk Djakarta Llyod, kata Sri Mulyani berasal dari konversi utang Subsidiary Loan Agreement (SLA) menjadi ekuitas. "Pembahasan tambahan PMN untuk KAI dan Llyod sudah dilakukan pemerintah di Banggar DPR RI, kemarin (12/7)," ujarnya.

Sementara anggota Komisi VI DPR, Nasril Bahar terkejut atas permohonan Menkeu. "Kita tidak mengharamkan PMN. Tapi seharusnya mematuhi mekanisme pembahasan, menyampaikan dulu ke Komisi VI dulu, sehingga kita tidak terkejut tiba-tiba minta persetujuan PMN dan sudah

dibahas di Banggar kemarin sore. Harusnya tata administrasi dipatuhi dengan baik," ujarnya.

Anggota Komisi VI lainnya, Bambang Haryo Soekartono secara tegas menolak tambahan PMN kepada KAI, khususnya untuk pembangunan LRT.

"Saya orang paling tidak setuju untuk PMN LRT. Angkutan tidak efisien, karena di Jepang banyak kecelakaan akibat LRT, ini bahaya. Pembangunan LRT Palembang saja butuh anggaran Rp 10 triliun, ini bisa dipakai buat beli 100 rangkaian kereta karena satu rangkaian kereta

saja hanya Rp 70 miliar." Saya tidak setuju buat LRT. Ini pembuangan uang negara," kata Bambang.

Komisi VI DPR belum menyetujui tambahan PMN untuk KAI dan Llyod pada rapat kerja kali ini. Rencananya pendalaman mengenai suntikan modal tersebut akan dibahas secara khusus pada pekan depan.

"Kita tidak mungkin memutuskan PMN dalam rapat kerja hari ini. Komisi VI menyepakati minggu depan dibahas lagi karena saat ini tidak cukup memadai informasi untuk kita sampai pada kesimpulan," jelasnya. (oto)